

PENINGKATAN AKSES KEUANGAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA

Baginda Parsaulian*

Email: bagindaparsauliannasution@yahoo.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi,
Sumatera Utara

ABSTRAK

Perkembangan inklusi keuangan (*financial inclusion*) didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* yang umumnya tidak tersentuh layanan keuangan (*unbanked*). Inklusi keuangan (*financial inclusion*) menjadi kunci dari upaya pemerintah dalam membangun sektor keuangan yang kuat dan inklusif serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi layanan sektor perbankan melalui tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *literature review*. Pada penelitian ini terlihat bahwa tingkat Inklusi keuangan (*financial inclusion*) di Indonesia mengalami perbaikan oleh karena pemberlakuan berbagai regulasi terkait dimana masyarakat pengguna yang memiliki akses layanan keuangan dengan usia di atas 15 tahun mengalami kenaikan dari 20% (2011) menjadi 36% (2014) dan terus meningkat menjadi 48,9% (2017). Apabila dibandingkan dengan negara lain, tingkat Inklusi keuangan (*financial inclusion*) tersebut adalah yang paling cepat pertumbuhannya bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain se-kawasan Asia Pasifik. Untuk meningkatkan pemahaman terkait jasa-jasa keuangan dan perbankan harus dilakukan dengan edukasi jasa keuangan dan perbankan terutama edukasi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, kaum wanita serta penduduk di daerah tertinggal yang belum terjangkau dengan layanan keuangan dan perbankan serta dibarengi dengan upaya pemerintah dalam peningkatan infrastruktur fisik sehingga dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Stabilitas Keuangan, *Financial Inclusion*

ABSTRACT

The development of financial inclusion is based on the impact of the crisis on groups in the bottom of the pyramid which are generally not touched by financial services (*unbanked*). Financial inclusion is the key to the government's efforts to build a strong and inclusive financial sector and to support sustainable development in Indonesia. The purpose of this study is to determine the distribution of banking sector services through the level of financial inclusion. The method used in this study is a literature review. In this study, it can be seen that the level of financial inclusion in Indonesia has improved due to the implementation of various related regulations where users who have access to financial services aged over 15 years have increased from 20% (2011) to 36% (2014). and continues to increase to 48.9% (2017). When compared to other countries, the level of financial inclusion is the fastest growing compared to other developing countries in the Asia Pacific region. To increase understanding related to financial and banking services, education in financial and banking services must be carried out, especially education for people with low incomes, women and residents in disadvantaged areas who have not been reached by financial and banking services, as well as government efforts to improve physical infrastructure. so that it can reach people in various regions in Indonesia.

Kata Kunci : Financial Stability, *Financial Inclusion*

*Corresponding author

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kemajuan di sektor keuangan merupakan inti dan hal yang paling penting pada proses pembangunan di suatu Negara (Demirgüç-Kunt et al., 2008). Sektor keuangan di setiap negara memiliki fungsi yang sangat vital dalam mendukung proses kegiatan ekonomi serta sosial kemasyarakatan dengan ritme yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi (Andrianaivo & Kpodar, 2012).

Institusi keuangan terutama perbankan sebagai lembaga keuangan melalui fungsi utamanya yaitu fungsi intermediasi memiliki peranan penting sebagai pendorong pemerataan pendapatan dalam mengurangi kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi serta pencapaian stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang.

Fungsi perantara keuangan atau intermediasi memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan efisiensi pada kegiatan perekonomian, mendukung operasional kegiatan pasar keuangan dalam menyalurkan dana (*lending*) pada pihak-pihak-pihak dengan peluang investasi yang menjanjikan atau produktif dan membutuhkan dana di sektor riil. Pembangunan pada sektor ini terutama pada sektor perbankan nasional, akan menghasilkan peningkatan akses dan pemanfaatan jasa-jasa keuangan dan perbankan secara luas oleh masyarakat dengan berbagai jenis produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semakin terbukanya akses serta penggunaan jasa-jasa perbankan tersebut maka masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dan mendayagunakan akses tersebut dalam kegiatan sehari-hari terutama perdagangan dalam rangka meningkatkan pendapatannya untuk pengembangan usaha yang memerlukan dana dengan penyaluran kredit apabila digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menjanjikan atau nproduktif. Kondisi saat ini yang terjadi adalah sulitnya akses terhadap jasa keuangan sehingga menyebabkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan miskin terkadang harus mengandalkan dana yang ada di tabungan dengan jumlah yang terbatas apabila akan berinvestasi, pengusaha kecil juga harus mengandalkan mengandalkan laba usaha yang diperoleh dalam melanjutkan kelangsungan dan operasional usahanya. Akibat hal tersebut,

ketimpangan pendapatan tidak berkurang secara agregat serta pertumbuhan ekonomi Negara secara agregat juga melambat (Allen et al., 2016).

Pesatnya arus globalisasi perekonomian dunia menciptakan liberalisasi perdagangan antar negara di dunia serta secara bersamaan terjadi pula integrasi sektor keuangan secara global (Rajan, 2003). Analisis empiris pada tingkat perusahaan-perusahaan, dunia industri dan rumah tangga telah diteliti kemudian juga dengan membandingkan kondisi beberapa negara ditemukan adanya hubungan pada jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sistem keuangan suatu negara dengan hubungan yang bersifat positif. Menurut penelitian tersebut, system keuangan yang maju akan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Cheng & Degryse, 2010).

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui distribusi layanan sektor perbankan di masyarakat dan salah satunya diukur dengan indikator berupa tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*). Inklusi keuangan (*financial inclusion*) tersebut berkaitan dengan tingkat kepraktisan atau kemudahan untuk mendapatkan akses serta menggunakan jasa-jasa keuangan (Gardeva & Rhyne, 2011), (L and Kiapper, 2012).

Manfaat yang akan dapat diwujudkan dari hal tersebut tidak hanya bagi lembaga keuangan, tetapi secara luas juga memiliki manfaat bagi pemerintah suatu negara, meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan bermanfaat bagi organisasi lain. Bagi masyarakat, akan memperluas akses layanan keuangan dari lembaga keuangan formal dengan produk-produk pengumpulan dana (*funding*) seperti dan para penduduk yang berada pada daerah-daerah tertinggal dan berada jauh dari kota atau terkendala secara geografis serta dilakukan pula peningkatan sarana dan prasarana terkait agar jasa keuangan dan perbankan tersebut menjangkau masyarakat. Inklusi keuangan (*financial inclusion*) memerlukan upaya sebagai usaha untuk melakukan akselerasi atau percepatan dengan berbagai intervensi-intervensi dan kebijakan, kebijakan tersebut dalam ranah kebijakan-kebijakan publik maupun pada ranah mekanisme pasar (Wahid, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang ada sebagai penelitian yang dilakukan antar-negara (Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013), (Zins & Weill,

2016), (Akudugu, 2013). Kebanyakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai inklusi keuangan (*financial inclusion*) hanya mempertimbangkan beberapa faktor-faktor sebagai faktor yang menentukan inklusi keuangan (*financial inclusion*) pada suatu negara seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor demografi. Kebaharuan penelitian ini adalah apabila diperhatikan di lapangan, inklusi keuangan (*financial inclusion*) menyebabkan dampak positif dan signifikan terhadap populasi atau masyarakat dan perkembangannya dan juga memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan (Aduda, J. Kalunda, 2012), hal ini yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kajian literatur (*literature review*) berupa penjelasan-penjelasan tentang teori-teori, temuan-temuan penelitian sebelumnya, serta hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber acuan sebagai dasar pembahasan pada penelitian (Setyosari, 2010). Kajian literatur (*literature review*) adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Kajian literatur (*literature review*) bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian kajian literatur (*literature review*) adalah menyediakan latar/basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan, mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu (Okoli & Schabram, 2010). Pada penelitian ini dilakukan *systematic literature review* yaitu metode *literature review* yang merupakan metode dan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan menilai secara kritis terkait dengan penelitian-penelitian yang relevan, serta mengumpulkan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data dari penelitian-penelitian tersebut (Liberati et al., 2009). Tujuan *systematic literature review* adalah untuk melakukan identifikasi terhadap semua bukti empiris yang sesuai dengan kriteria inklusi

yang ditentukan sebelumnya, dimana identifikasi tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti keluasan penelitian yang sudah ada terkait dengan peningkatan akses keuangan masyarakat melalui inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan sumber data dari sumber-sumber relevan untuk memperoleh artikel relevan yang akan direview, seperti google scholar, scopus dan Elsevier. Analisis hasil berisi uraian yang lengkap tentang cara menganalisis konsep yang dieliti dengan pendekatan metode eksposisi yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang ada sehingga pada akhirnya dapat dicari korelasi antara data-data tersebut. Dari hal tersebut maka akan peroleh gambaran mengenai peningkatan akses keuangan masyarakat melalui sistem keuangan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) merupakan antitesis dari eksklusi keuangan (Leyshon et al., 2008). Proses eksklusi keuangan yang terjadi saat ini menjadikan masyarakat dengan penghasilan rendah atau miskin belum mendapatkan keuntungan (*benefit*) dari sektor keuangan dan perbankan, sebaliknya hanya memberikan manfaat negatif atau kerugian kepada masyarakat oleh karena sistem keuangan tersebut sulit diakses.

Indikator literasi keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu pengetahuan dasar keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, investasi (Sri et al., 2013) dengan dimensi inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah yaitu mutu (*quality*), manfaat (*usage*), jangkauan (*outreach*) dari jasa keuangan. Jangkauan (*outreach*) mencakup daya masyarakat dalam menjangkau layanan inti dan perbankan, manfaat (*usage*) adalah mencakup tingkat manfaat sistem keuangan dan perbankan terkait melalui berbagai fasilitas seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), fisik perbankan, sedangkan mutu (*quality*) adalah level produk-produk keuangan yang ada untuk solusi keuangan masyarakat (Dienillah & Anggraeni, 2016). Apabila dirumuskan sistem keuangan inklusif merupakan konsep yang sederhana sebagai program yang memihak pada pertumbuhan ekonomi dan juga memihak pada penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Penelitian mengenai Inklusi keuangan (*financial inclusion*) sebagian besar menunjukkan bahwa Inklusi keuangan (*financial inclusion*) berdampak positif dan signifikan. Penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa masyarakat dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, memiliki tingkat pendidikan tinggi atau terdidik serta lebih tua dari sisi usia memiliki kesempatan (*probabilitas*) yang lebih cenderung tinggi untuk melakukan akses pada keuangan dan perbankan (Sarma & Pais, 2011), (Zins & Weill, 2016), (Allen et al., 2016).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender (*gender gap*) pada akses keuangan yang menunjukkan bahwa kesempatan (*probabilitas*) kaum perempuan untuk memiliki akses keuangan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki (Allen et al., 2016), (Zins & Weill, 2016). Selain itu, personal dengan status menikah juga berkesempatan yang cenderung lebih tinggi untuk akses keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu rumah tangga maka semakin kecil kesempatan (*probabilitas*) memiliki akses keuangan (Allen et al., 2016). Literasi keuangan (*financial inclusion*) memiliki dampak yang positif terhadap akses keuangan (Grohmann et al., 2018).

Penelitian selanjutnya mengenai literasi keuangan (*financial inclusion*) menunjukkan bahwa biaya layanan perbankan juga berpengaruh sebagai faktor lain pada inklusi keuangan (*financial inclusion*) (Allen et al., 2016). Penelitian tersebut meneliti mengenai biaya layanan yang dikeluarkan untuk melakukan akses layanan keuangan yaitu biaya transaksi, biaya transportasi, serta waktu tunggu (*waiting time*) untuk mendapatkan layanan perbankan, hal ini diteliti untuk menggambarkan biaya dalam bentuk waktu dan menunjukkan bahwa biaya-biaya tersebut masih tinggi. Kemudian penyebab tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang masih rendah di Indonesia adalah karena sebahagian besar penduduk Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan dan perbankan disebabkan hambatan alam atau geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jarak antar wilayah yang jauh serta transportasi yang belum memadai sehingga biaya pendirian dari kantor cabang perbankan menjadi cukup besar. Belum lagi persyaratan-persyaratan formalitas yang tinggi bagi pendirian lembaga keuangan dan perbankan, proses yang sangat kompleks juga sebagai hambatan sehingga jumlah kantor cabang perbankan tidak meningkat signifikan dan bagi masyarakat juga kesulitan dalam mengakses layanan perbankan secara fisik (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

Apabila diperhatikan lebih lanjut dilapangan, kendala akses keuangan dan perbankan dimasyarakat juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi makroekonomi suatu negara, posisi pasar perbankan, tingkat kompetisi yang dihadapi oleh perbankan, model bisnis bank yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peraturan-peraturan atau regulasi yang dijalankan pada operasional lembaga keuangan dan perbankan. Meskipun terdapat berbagai kendala tersebut tetapi tingkat pertumbuhan rata-rata tingkat perkembangan inklusi keuangan tetap mengalami peningkatan di beberapa negara Asia (Demirgüç-Kunt et al., 2008).

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut terdapat keunggulan dari peningkatan tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) selain dapat mengatasi ketimpangan pendapatan, inklusi keuangan (*financial inclusion*) juga berpotensi pada peningkatan stabilitas keuangan secara agregat, oleh karena peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin pada produk tabungan (*funding*) sehingga dapat memperkuat kemampuan rumah tangga di masyarakat untuk dalam mengatasi goncangan keuangan yang dialaminya akibat dampak buruk krisis sehingga ketahanan ekonomi suatu negara secara agregat juga akan stabil. Pada sisi lain hal ini akan mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara (Hannig & Jansen, 2011)

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan kelemahan dari inklusi keuangan (*financial inclusion*) antara lain disebabkan oleh penurunan standar kredit (*credit standart*). Hal ini terjadi karena lembaga keuangan dan perbankan berusaha menjangkau berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau sebelumnya oleh perbankan (*unbankable*). Untuk menjangkau masyarakat tersebut maka dilakukan penurunan persyaratan-persyaratan pinjaman sehingga dapat meningkatkan risiko reputasi bank. Sebagai contoh, dikarenakan untuk meningkatkan fasilitas jasa-jasa keuangan, beberapa negara menurunkan atau memperlonggar standar pendirian dari lembaga keuangan dan perbankan pada daerah pedesaan, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan oleh karena regulasi tidak dilaksanakan secara sempurna (Khan, 2011)

Sesuai dengan penelitian-penelitian tersebut diatas maka penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pada sektor keuangan yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin melalui minimalisasi kendala akses sistem keuangan dengan penghapusan hambatan-hambatan baik penghapusan hambatan harga maupun hambatan non-harga (Demirgüç-Kunt et al., 2008), (Chandra, 2010).

Pembahasan

Perkembangan Akses Tehnologi Informasi dan Penggunaan Uang di Era Tehnologi di Indonesia

Dunia telah melalui tiga era perekonomian yaitu era pertanian (*agricultural era*) dimana fokus perkembangan ekonomi pada sektor pertanian, era industrial (*industrial era*) dimana fokus perkembangan ekonomi pada sektor industri, dan era informasi (*information era*) dengan fokus pada perkembangan teknologi dan internet (Elliott, 1992). Teknologi informasi di bidang komputer, telepon seluler dan internet mengalami perkembangan yang cepat dan pesat, dimulai dari kemajuan di bidang pengurangan biaya (*cost*) tetapi pengurangan biaya (*cost*) tersebut menambah kinerja (*performance*). Internet merupakan sumber daya dengan kemampuan untuk menjangkau informasi dalam lingkup dunia dengan waktu yang singkat. Komputer dan telepon seluler dalam hubungannya dengan internet sangat penting oleh karena komputer dan telepon seluler merupakan sarana pemindahan data dan mengeksekusikan program terkait pemindahan data tersebut.

Teknologi Informasi dalam perkembangannya merubah kebiasaan masyarakat dan operasional industri dengan sangat cepat. Teknologi informasi telah mengganti paradigma yang sebelumnya serta merubah perilaku lingkungan bisnis untuk menjadi lebih praktis dan efisien dari sisi waktu layanan dan kedekatan dengan konsumen. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan pembangunan di Indonesia (Al-Mursyid, 2020).

Perkembangan kehidupan dunia ekonomi dan bisnis saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yaitu ekonomi yang berbasis sumber daya ke paradigma ekonomi berbasis pengetahuan atau kreativitas (Ikbal et al., 2018). Perkembangan teknologi telepon seluler dan internet di Indonesia berkembang sangat masif yang dapat memperluas penyampaian informasi serta mengatasi berbagai hambatan jarak dan waktu layanan. Internet dan

Telepon dapat diberdayakan oleh industri perbankan dalam upaya perluasana akses jasa keuangan kepada masyarakat. Hampir keseluruhan perbankan di Indonesia telah memiliki aplikasi yang memanfaatkan internet dan telepon seluler berupa aplikasi keuangan sebagai media untuk melakukan transaksi keuangan digital dalam rangka mempermudah dalam melayani masyarakat untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan yang dahulu harus dilakukan *on the spot*.

Masyarakat Indonesia dalam kegiatan keseharian saat ini bergantung dengan pada internet. Apabila perhatikan sejak dilakukan upaya-upaya pengembangan infrastruktur internet mulai pada tahun 1980-an di Indonesia, jumlah pengguna internet aktif terus meningkat. Gaya hidup masyarakat yang semakin digital akibat didorong pandemi, membuat layanan digital semakin meningkat penggunaannya. Indonesia dinilai memiliki banyak daya tarik, antara lain tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73 % dari populasi masyarakat atau sekitar 200 juta pengguna internet (survei APJII tahun 2020) dan lebih 54 % populasinya adalah merupakan generasi Z dan generasi milenial yang memiliki gaya hidup digital (*digital life*).

Seluruh aspek kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan uang (*money*) (Judisseno, 2002). Pembahasan mengenai uang sejak dahulu merupakan pembahasan yang hangat dan menarik. Filsuf Plato tertarik mengenai pembahasan mengenai uang dan menyatakan bahwa uang bersifat mandul sehingga tidak dapat dikembangkan dengan sistem bunga. Kegunaan dari uang (*money*) pada perkonomian modern adalah alat tukar, pengukur nilai dan penyimpan kekayaan. Seorang ahli ekonomi lainnya yaitu Schumpeter menitikberatkan pada ketidaknetralan uang (*money*) dimana aliran uang (*money*) tersebut memiliki pengaruh radikal pada suatu negara di sistem ekonomi dan keuangan. Sistem ekonomi dan keuangan memiliki peranan penting pada setiap proses inovasi di suatu negara, proses inovasi tersebut memerlukan dukungan dari lembaga keuangan dan perbankan berupa pembiayaan. Lebih lanjut nantinya lembaga keuangan dan perbankan memiliki fungsi atau peran dalam mendorong terjadinya transformasi sosial di masyarakat pada suatu Negara dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat.

Keynes menyatakan bahwa uang (*money*) mempengaruhi sisi permintaan (*demand side*) pada suatu negara. Uang (*money*) pada suatu negara seharusnya diciptakan atau diedarkan untuk

selanjutnya disalurkan kepada sektor-sektor yang menjanjikan dalam bentuk pinjaman sehingga meningkatkan kemampuan industri untuk memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan atau kesempatan kerja untuk masyarakat serta lebih lanjut meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi dengan pesat, sistem pembayaran yang tersedia dimasyarakat juga beradaptasi dan terus mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan perubahan fisik uang menjadi digital. Pada awalnya transaksi dengan uang tunai (*cash*) dan giro, saat ini bertransformasi pada bentuk yang lebih praktis yaitu berupa pembayaran bukan tunai atau *non-cash* berupa kartu debit atau (*debit card*), kartu kredit atau (*credit card*) serta transfer tunai dana (*cash transfer*), transaksi melalui ATM (*automatic Teller Machine*) kemudian saat ini tersedia produk prepaid card (*e-money*) sebagai bentuk uang digital dengan aplikasi pada telepon selular atau bentuk aplikasi digital (*e-wallet*) seperti DANA, OVO, Shopee Pay, Gopay dan lainnya.

Gambaran Inkusi Keuangan (*Financial Inclusion*) Kondisi Indonesia

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan kondisi yang baik, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada periode 2013-2016, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya sebesar 29,66%. Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah dihitung pada jumlah rekening yang dihitung per populasi, serta jumlah penggunaan rekening untuk tujuan menabung, penarikan, transaksi transfer, kredit atau pinjaman dalam waktu satu tahun terakhir (L and Kiapper, 2012), (Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013), (Allen et al., 2016).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) di Indonesia yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 75%. Upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan target tersebut adalah merancang dan meluncurkan berbagai program, dimana program-program tersebut antara lain adalah Laku Pandai dan program Layanan Keuangan Digital (LKD). Apabila diperhatikan dilapangan, produk-produk tersebut tersedia pada perbankan di Indonesia.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) di Indonesia mengalami perbaikan oleh karena pemberlakuan berbagai regulasi terkait sehingga populasi masyarakat pengguna yang memiliki akses layanan keuangan dengan usia di atas 15 tahun mengalami kenaikan dari 20% (2011) menjadi 36% (2014) dan terus meningkat menjadi 48,9% (2017). Apabila dibandingkan dengan negara lain, tingkat Inklusi keuangan (*financial inclusion*) tersebut adalah yang paling cepat pertumbuhannya bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain se-kawasan Asia Pasifik.

Apabila ditelaah lebih lanjut, isu yang paling hangat dibahas mengenai sektor keuangan dan perbankan di Indonesia salah satunya adalah mengenai masalah tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan kesimpulan yang didapat secara umum bahwa tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pemahaman masyarakat apalagi di daerah pedesaan masih menganggap bahwa sektor keuangan masih terbatas serta masih terdapat ketidaksesuaian dari fasilitas atau fitur-fitur produk, besaran biaya yang harus dibayarkan untuk layanan keuangan, sistem pengelolaan layanan keuangan serta lokasi pelayanan perbankan, hal tersebut umumnya belum atau tidak dapat terjangkau masyarakat umum terutama masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam rangka peningkatan tingkat inklusi keuangan (*financial inclusion*) tersebut pada tahun 2014, telah diluncurkan layanan perbankan tanpa harus hadir ke cabang layanan perbankan (*branchless banking*) dengan layanan mobile (*mobile based*) maupun dengan website (*web*

based) serta jasa pihak ketiga dengan agen perbankan yaitu LKD dan layanan keuangan tanpa cabang (*branchless banking*) yang dinamakan Laku Pandai untuk melayani masyarakat yang tidak memiliki dan memiliki akses yang terbatas pada layanan keuangan dan perbankan.

Inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang telah dilaksanakan dan terus diupayakan pengembangannya lebih lanjut memiliki fokus pada akses keuangan dan perbankan bagi masyarakat yang masih belum menikmati dan tidak terjangkau oleh jasa-jasa lembaga keuangan formal oleh karena adanya hambatan untuk mengaksesnya. Hal ini dilakukan dengan target pada masyarakat yang aksesnya jauh dari lembaga keuangan dan masyarakat berpendapatan rendah. Hambatan-hambatan pada masyarakat disebabkan beberapa faktor penyebab terutama pada tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, ketidaksesuaian antara fitur-fitur produk pengumpulan dana (*lending*) dan penyaluran dana (*funding*) yang saat ini telah ditawarkan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat berpendapatan rendah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Indonesia saat ini dalam kegiatan perekonomian sehari-hari menggunakan internet melalui media telekomunikasi untuk layanan keuangan. inklusi keuangan (*financial inclusion*) akan mengatasi terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat serta secara agregat akan menciptakan stabilitas keuangan. Peningkatan akses masyarakat pada lembaga keuangan formal secara beriringan juga akan meningkatkan kapasitas rumah tangga untuk berusaha, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait jasa perbankan dalam konteks inklusi keuangan (*financial inclusion*), pemerintah dan perbankan serta instansi terkait terus melaksanakan dan memperluas sosialisasi jasa keuangan dan perbankan terutama dilakukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, kaum wanita serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal dan terluar dan secara geografis memiliki kendala serta pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur fisik sehingga jasa-jasa keuangan dapat menjangkau masyarakat dengan perkembangan teknologi tersebut di berbagai daerah di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang terutama telepon seluler dan internet dilakukan secara efisien dan efektif terutama perluasan jaringan jasa-jasa perbankan dengan pemanfaatan telepon seluler dan internet tersebut secara merata di berbagai daerah Indonesia dalam mengurangi hambatan-hambatan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduda, J. Kalunda, F. (2012). Financial Inclusion and financial sector stability with reference to Kenya. *Journal of Applied Finance and Banking*, 2(6), 95–120. [https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/duniasiana/Documents/Financial Inclusion and Financial Sector Stability With Reference To Kenya A Review of Literature.pdf](https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/duniasiana/Documents/Financial%20Inclusion%20and%20Financial%20Sector%20Stability%20With%20Reference%20To%20Kenya%20A%20Review%20of%20Literature.pdf)
- Akudugu, M. . (2013). The Determinants of Financial Inclusion in Western Africa : Insights from Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-2847, 4(8), 1–10. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/6688/7098>
- Al-Mursyid, A. R. (2020). Pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2). <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.372>
- Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Andrianaivo, M., & Kpodar, K. (2012). Mobile Phones, Financial Inclusion, and Growth. *Review of Economics and Institutions*, 3(2). <https://doi.org/10.5202/REI.V3I2.75>
- Chandra, Y. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Flight dengan Pendekatan Regresi Data Panel. *Institut Pertanian Bogor, Bogor*. <http://repository.ipb.ac.id:8080/handle/123456789/62184>
- Cheng, X., & Degryse, H. (2010). The impact of bank and non-bank financial institutions on local economic growth in China. *Journal of Financial Services Research*, 37(2–3), 179–199. <https://doi.org/10.1007/s10693-009-0077-4>
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. *Brookings Papers on Economic Activity, SPRING 2013*, 279–321. <https://doi.org/10.1353/eca.2013.0002>
- Demirgüç-Kunt, Beck, A. ., & Honohan, T. H. L. ; (2008). *Finance for all?*
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 409–430. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574>

- Elliott, R. K. (1992). *The Thwtd Wave Breaks on the Shofe \$ of Aooountnig*.
- Gardeva, A., & Rhyne, E. (2011). Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion. *Center for Financial Inclusion*, 12, 1–54. <https://www.centerforfinancialinclusion.org/opportunities-and-obstacles-to-financial-inclusion>
- Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 111, 84–96. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020>
- Hannig, A., & Jansen, S. (2011). Financial inclusion and financial stability: Current policy issues. In *Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets* (pp. 284–318). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1729122>
- Ikbāl, M., Mustafa, S. W., & Bustami, L. (2018). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1). <https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.293>
- Judisseno, R. K. (2002). *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lf6v1QirwDkC&oi=fnd&pg=PR17&dq=sistem+moneter+ekonomi&ots=jVnUtl-CA&sig=nOK9P2APJQhkwYiqcXUa3zKnXw&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem+moneter+adalah&f=false
- Khan, H. (2011). *Khan, H. (2011) Financial Inclusion and Financial Stability Are They Two Sides of the Same Coin BANCON 2011, Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai. - References - Scientific Research Publishing.* [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2351293](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2351293)
- L and Kiapper, D. A. (2012). *'Measuring financial inclusion. The Global findex database*. Policy Research Working Paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2043012&download=yes
- Leyshon, A., French, S., & Signoretta, P. (2008). Financial exclusion and the geography of bank and building society branch closure in Britain. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 33(4), 447–465. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2008.00323.x>
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *BMJ*, 339. <https://doi.org/10.1136/BMJ.B2700>
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1954824>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Statistik Perbankan Indonesia- November 2015* (Vol. 84). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/statistik-perbankan-indonesia-januari-2013.aspx>
- Rajan, R. S. (2003). Economic globalization and Asia: Essays on finance, trade, and taxation. In *Economic Globalization and Asia: Essays on Finance, Trade, and Taxation*. <https://doi.org/10.1142/5289>
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan - Prof. Dr. H. Punaji Setyosari, M.Ed - Google Buku*. https://books.google.co.id/books?id=SnA-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false
- Sri, A., Suramaya, M. &, & Kewal, S. (2013). Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi. *Jurnal Economia*, 9(2), 130–140. <https://doi.org/10.21831/ECONOMIA.V9I2.1804>
- Wahid, N. (2014). *Keuangan inklusif: Membongkar hegemoni keuangan: Nusron Wahid; peyunting, Ining Isaiyas / OPAC Perpustakaan Nasional RI*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911935>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>